

Implementasi Pancasila dalam Membangun Ekonomi Nasional yang Bebas dari Jeratan Imperialisme

Sabil Ryzada^{1*}, Falsya Fitriany², Devara Calista Putri³, Galih Firmansyah Putra⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Alamat: Jl. Pakuan P.O. BOX 452, Bogor 16143

Korespondensi penulis: sabilryanzadaa@gmail.com

Abstract. *This research discusses the implementation of Pancasila values in building national economic independence that is free from neo-imperialism. Indonesia's economic dependence on foreign countries, which has increased in line with the global crisis, poses a challenge to foreign dominance in strategic sectors. This research aims to analyze how Pancasila values such as cooperation, social justice, and independence can be the basis for independent and equitable economic policies. The method used is library research with literature study and analysis of economic policy documents. The results show that the application of Pancasila values in the development of cooperatives and MSMEs as well as the distribution of economic resources can confront neo-imperialism and strengthen economic sovereignty. The research highlights the importance of synergy between the government, the private sector, and the community as well as policy reforms in favor of economic independence. In conclusion, the implementation of Pancasila values in economic policy can be a strong foundation for building sustainable national economic independence.*

Keywords: *Independence, Pancasila, Neo-imperialism, Economy*

Abstrak. Penelitian ini membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun kemandirian ekonomi nasional yang bebas dari jeratan neo-imperialisme. Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara asing, yang meningkat seiring krisis global, menimbulkan tantangan dominasi asing dalam sektor strategis. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian dapat menjadi dasar kebijakan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan. Metode yang digunakan adalah library research dengan studi literatur dan analisis dokumen kebijakan ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan koperasi dan UMKM serta distribusi sumber daya ekonomi dapat menghadapi neo-imperialisme dan memperkuat kedaulatan ekonomi. Penelitian menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat serta reformasi kebijakan mendukung kemandirian ekonomi. Kesimpulannya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun kemandirian ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kemandirian, Pancasila, Neo-imperialisme, Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Ketergantungan ekonomi terhadap negara asing yang merupakan salah satu persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia saat ini. Krisis ekonomi tahun 1997 membuka pintu bagi institusi internasional seperti halnya IMF dan World Bank untuk memaksakan restrukturisasi ekonomi berlandaskan neoliberal. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan saat itu mengharuskan Indonesia untuk mampu mengikuti disiplin pasar bebas yang mengedepankan efisiensi dan kompetisi global. Akibatnya, kedaulatan ekonomi nasional semakin terkikis karena sektor-sektor strategis mulai dikuasai oleh kepentingan asing. Indonesia, yang sebelumnya memiliki harapan besar untuk membangun ekonomi yang mandiri, justru terjebak dalam ketergantungan pada investasi dan teknologi asing (Anggoro & Dwiranda, 2019). Dalam relasi kerja internasional, Indonesia cenderung terbatas pada

penyediaan buruh murah dan bahan baku bagi industri global, suatu kondisi yang oleh Soekarno disebut sebagai bentuk neo-imperialisme (Santoso, 2018).

Dominasi akan investasi asing, impor teknologi, dan pengaruh kebijakan ekonomi internasional sering kali menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan terhadap tekanan global (Prabowo & Sihaloho, 2023). Ketergantungan ini menciptakan situasi di mana Indonesia harus terus mengikuti arus kebijakan ekonomi global yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan nasional. Akibatnya, kemandirian ekonomi yang seharusnya menjadi prioritas justru terabaikan. Dalam persaingan ekonomi dunia, daya saing Indonesia menjadi lemah karena ketergantungan yang tinggi pada produk dan teknologi impor. Di tengah situasi ini, Pancasila sebagai falsafah negara hadir menawarkan solusi komprehensif mengatasi permasalahan ekonomi dan memperkuat kedaulatan.

Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial, menjadi landasan filosofis yang sangat relevan untuk membangun kebijakan ekonomi yang mandiri dan berkeadilan (Utami dkk., 2023). Gotong royong, misalnya, dapat diterapkan dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Persatuan menjadi penting untuk mengintegrasikan berbagai sektor ekonomi dalam satu kerangka kerja yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat, dengan tujuan utama pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan sektor domestik (Gedeona, 2004). Pendekatan ini menuntut kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Dalam ekonomi global, implementasi Pancasila berpotensi menjadi tameng menghadapi neo-imperialisme ekonomi. Neo-imperialisme, yang muncul melalui dominasi dari perusahaan multinasional, investasi asing yang tidak berpihak pada kepentingan nasional, serta ketergantungan pada produk impor, melemahkan kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, rencana impor ribuan sapi perah oleh presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memenuhi kebutuhan susu domestik yang mencerminkan ketergantungan tersebut. Ketergantungan pada impor tidak hanya melemahkan industri domestik, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi nasional (Munzidah dkk., 2024). Penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi langkah strategis untuk mampu mengurangi ketergantungan ini melalui penguatan sektor domestik, pengembangan UMKM, hilirisasi sumber daya alam, dan penguatan industri strategis nasional yang mampu bersaing di pasar global.

Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi nasional menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi, tekanan politik dan ekonomi dari lembaga internasional, serta kesenjangan teknologi dan infrastruktur domestik. Tantangan ini menuntut adanya analisis yang mendalam untuk memahami akar permasalahan serta solusi holistik yang mampu mengatasi berbagai hambatan. Misalnya, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Selain itu, tekanan politik dan ekonomi dari lembaga internasional harus dihadapi dengan strategi diplomasi yang cerdas dan berorientasi pada kepentingan nasional. Kesenjangan teknologi dan infrastruktur domestik juga harus diatasi melalui investasi yang tepat dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berdampak besar secara positif (Sukandi, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam membangun kemandirian ekonomi nasional yang bebas dari jeratan imperialisme. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memperkuat peran Pancasila sebagai dasar sistem ekonomi Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan oleh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak hanya menjadi wacana teoretis, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik nyata yang membawa perubahan positif bagi perekonomian Indonesia (Salim, 2019).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori ketergantungan ekonomi yang berkembang dalam studi ekonomi-politik global menyoroti bagaimana negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering kali berada dalam posisi subordinat dalam sistem ekonomi internasional (Gunawan, 2023). Ketergantungan ini ditandai dengan hubungan yang asimetris antara negara maju dan berkembang, di mana negara maju menguasai teknologi, modal, dan pasar, sementara negara berkembang menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah. Teori ini yang relevan dalam memahami posisi Indonesia dalam ekonomi global, terutama setelah krisis ekonomi 1997 yang memperdalam ketergantungan pada bantuan dan investasi asing. Dalam konteks ini, teori ketergantungan membantu dalam menjelaskan bagaimana ketergantungan

ekonomi dapat melemahkan kedaulatan nasional dan menghambat pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu wilayah (Ardiansyah dkk., 2024).

Neo-imperialisme sebagai konsep teoritis merujuk pada dominasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara maju terhadap negara berkembang melalui mekanisme ekonomi, seperti investasi asing, utang luar negeri, dan juga kontrol terhadap pasar internasional (Afisi, t.t.). Neo-imperialisme ini yang tidak lagi menggunakan cara-cara militer untuk mendominasi negara lain, melainkan melalui kontrol ekonomi yang subtil namun efektif. Dalam konteks Indonesia, neo-imperialisme tampak dalam bentuk dominasi perusahaan multinasional yang menguasai sektor-sektor strategis, ketergantungan pada impor teknologi, dan intervensi lembaga-lembaga keuangan internasional dalam kebijakan ekonomi nasional. Teori ini yang memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami dinamika kekuasaan dalam hubungan ekonomi secara internasional dan implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia.

Implementasi Pancasila sebagai dasar filosofi ekonomi nasional menawarkan pendekatan yang berbeda dari teori ekonomi konvensional yang berorientasi pada pasar bebas (Agusalim dkk., 2014). Pancasila menekankan pentingnya gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi sebagai prinsip dasar dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menolak dominasi asing dan berusaha membangun ekonomi yang berbasis pada kekuatan domestik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi, Indonesia dapat menciptakan model-model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan kemandirian nasional. Teori ekonomi Pancasila ini menantang paradigma neoliberal dan menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia, sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi di tengah globalisasi (Simanjuntak dkk., 2021).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada kajian pustaka untuk mendeskripsikan secara mendalam berkenaan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami dan menganalisis fenomena yang kompleks dan dinamis dalam konteks ekonomi dan kebijakan nasional.

Desain penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus pada analisis berbagai dokumen dan literatur terkait Pancasila dan ekonomi. Sumber data yang digunakan meliputi buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Data ini dikumpulkan dari

berbagai sumber yang kredibel, termasuk *database* akademik, perpustakaan, dan arsip dokumen pemerintah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan (Widyatama dkk., 2024). Data yang diperoleh kemudian dicatat dan disusun dalam tabel untuk mempermudah analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengorganisasi informasi secara sistematis dan memfasilitasi identifikasi pola-pola serta hubungan antar variabel yang penting dalam penelitian ini.

Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis konten (Sofwatillah dkk., 2024). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk dapat mengidentifikasi dan mengategorikan informasi berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengungkap pola-pola, tantangan, dan peluang yang ada dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai sektor ekonomi secara nasional.

Hasil penelitian disusun dalam format laporan ilmiah yang baku, mencakup pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Setiap bagian dari laporan ditulis secara sistematis dan jelas, dengan mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang berlaku. Dalam laporan ini, hasil analisis disajikan secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebijakan ekonomi Indonesia.

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini dicantumkan dalam daftar pustaka dengan mengikuti format pengutipan yang diakui secara akademis, seperti APA atau MLA. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa semua sumber yang digunakan dapat dilacak dan diverifikasi, serta untuk menjaga integritas akademis penelitian.

Sebagai bagian dari metode penelitian, evaluasi kritis terhadap studi-studi sebelumnya juga dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah pengetahuan dan kontribusi unik yang dapat ditawarkan oleh penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang topik yang dibahas, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pengetahuan dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik secara menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketergantungan Ekonomi Sebagai Bentuk Neo-Imperialisme

Ekonomi merupakan pilar utama bagi kelangsungan dan kemajuan sebuah negara. Dalam era globalisasi yang semakin kompleks, berbagai strategi dan kebijakan dirancang untuk memastikan ekonomi nasional dapat tumbuh sesuai dengan target dan kebutuhan

negara tersebut. Salah satu langkah penting yang ditempuh oleh Indonesia adalah melalui investasi asing. Investasi ini tidak hanya berperan dalam menambah devisa negara tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, dengan adanya investasi asing, diharapkan terjadi transfer teknologi yang dapat meningkatkan daya saing industri secara nasional.

Tahun 2023 menjadi momentum penting bagi Indonesia dengan pencapaian yang signifikan dalam sektor investasi. Menurut data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi asing mencapai Rp 1.418,9 triliun, yang melebihi target investasi tahun 2023 sebesar Rp 1.400 triliun dengan persentase 101,3%. Dari jumlah tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang Rp 744 triliun atau 54,2% dari total investasi. Capaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 22,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Keberhasilan ini tidak lepas dari kontribusi negara-negara seperti Singapura, Cina, Hong Kong, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat yang menjadi investor terbesar. Korea Selatan juga menunjukkan partisipasi yang signifikan dengan berada di urutan ketujuh (Anonim, 2024).

Investasi asing memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan transfer teknologi. Namun, di sisi lain, investasi asing juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri bagi ketahanan nasional. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi neo-imperialisme ekonomi, di mana kendali atas sumber daya dan kebijakan ekonomi domestik bisa terpengaruh oleh kepentingan asing. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kwame Nkrumah, meskipun suatu negara merdeka, jika investasi asing mendominasi, kebijakan negara tersebut sering kali dipengaruhi oleh kekuatan eksternal, seperti bekas penjajah atau negara adidaya. Hal ini menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing, sehingga mengurangi kedaulatan ekonomi (BPMI Setpres, 2024).

Dalam upaya memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama ekonomi, Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja ke luar negeri. Salah satu agenda pentingnya adalah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Lima, Peru. Dalam forum ini, Presiden Prabowo berkesempatan untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia lainnya dan membahas berbagai isu ekonomi global yang relevan. Selain itu, kunjungan ke Brasil untuk menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro menjadi momen penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perekonomian

global (Aliansi Kebangsaan & Bakti, 2019). Diharapkan kunjungan ini dapat membuka peluang kerja sama yang luas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meski ekonomi yang terkait dengan pihak eksternal dapat membawa manfaat, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi memicu bentuk baru dari imperialisme. Imperialisme modern tidak lagi berbentuk penguasaan wilayah secara fisik, melainkan melalui dominasi iptek dan permodalan. Dalam skenario ini, negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi dan politik negara lain melalui investasi dan bantuan ekonomi. Tujuannya tetap sama: menguasai sumber daya bangsa lain yang lebih lemah demi kepentingan dan kemakmuran bangsanya sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang mampu melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan potensi kerja sama internasional.

Dalam konteks globalisasi saat ini, negara-negara harus berhati-hati dalam menjaga kedaulatan ekonomi mereka. Pemerintah yang mana perlu memastikan bahwa kerja sama internasional membawa manfaat maksimal bagi rakyat dan tidak merugikan kepentingan nasional. Kebijakan yang dirancang harus mampu menyeimbangkan antara membuka pintu bagi investasi asing dan menjaga kemandirian serta ketahanan ekonomi nasional. Hal ini memerlukan strategi yang matang, pengawasan yang ketat, serta kerja sama yang erat antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa investasi asing benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara (Hamid, t.t.).

Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kemandirian Ekonomi

Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila harus menjadi landasan bagi sistem perekonomian di Indonesia (Firdaus & Ahadah, 2022). Oleh karena itu, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang dikenal dengan istilah Ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berlandaskan pada lima prinsip utama, yaitu: berketuhanan, perikemanusiaan, berjiwa nasionalis, berkerakyatan, dan berkeadilan. Sistem ekonomi ini khas (berjati diri) Indonesia, yang digali dan dikembangkan berdasarkan realitas kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan keberlanjutan. Penerapan Ekonomi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkelanjutan dan dapat melindungi serta memajukan kepentingan bangsa Indonesia. Perekonomian Indonesia

sebagai sebuah sistem kehidupan bangsa harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan (Hamid, t.t.) berikut:

- a. Melindungi kepentingan seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- c. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas kehidupan bangsa.
- d. Mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam setiap sila menjadi prinsip dasar dalam membangun kemandirian ekonomi, dengan tujuan terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang terdahulu. Beberapa nilai tersebut antara lain:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Perekonomian Indonesia harus digerakkan oleh semangat ekonomi yang berpijak pada etika moral dan sosial yang tinggi. Nilai-nilai etis harus diterapkan dalam ekonomi agar tidak muncul neo-imperialisme, melainkan nilai nasionalisme yang kokoh. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia yang tergerak oleh semangat keagamaan yang akan mendorong terciptanya ekonomi yang adil dan merata, serta menghindarkan dominasi pihak luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Masyarakat Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan pemerataan sosial. Oleh karena itu, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial harus diatasi secara tegas. Dalam implementasinya, sistem ekonomi harus mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak ada lagi kemiskinan yang meluas. Penerapan prinsip ini mengharuskan adanya perhatian yang besar terhadap pemerataan kesempatan dan distribusi sumber daya ekonomi.

- c. Persatuan Indonesia

Semangat nasionalisme ekonomi menjadi semakin penting di tengah era globalisasi. Perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri harus menjadi cita-cita bangsa. Pancasila sebagai dasar ekonomi bangsa Indonesia harus menjadi penopang utama bagi terciptanya persatuan dalam ekonomi, yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok. Oleh karena itu, implementasi ekonomi Pancasila mengutamakan kerja sama yang harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan perekonomian yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam sistem ekonomi Pancasila, demokrasi ekonomi yang berdasar pada prinsip kerakyatan dan kekeluargaan menjadi landasan perilaku ekonomi di Indonesia. Koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini untuk implementasi dari permusyawaratan perwakilan menghadapi tantangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang terwakili dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, esensi Pancasila perlu diterapkan lebih dalam untuk memastikan bahwa perwakilan yang ada benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Perekonomian Indonesia harus mengutamakan keseimbangan yang harmonis antara perencanaan nasional dan desentralisasi ekonomi yang memberikan otonomi luas bagi daerah. Keadilan sosial dalam ekonomi harus tercipta melalui distribusi yang adil dan merata, tanpa menimbulkan kesenjangan yang signifikan antara pusat dan daerah. Sistem ekonomi yang adil dan bertanggung jawab akan mendukung tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam perekonomian, Indonesia dapat membangun sistem ekonomi yang bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial. Ekonomi Pancasila menjadi landasan penting dalam upaya mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.

Tantangan Implementasi

Neo-imperialisme selalu hadir dalam berbagai sektor ekonomi, yang kemudian menjadi tantangan besar bagi ketahanan bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, tantangan utama adalah upaya negara-negara lain untuk menguasai Indonesia melalui cara-cara yang lebih halus dan modern, yang dikenal dengan istilah neo-imperialisme. Neo-imperialisme dapat dijelaskan sebagai bentuk penjajahan ekonomi yang tidak lagi tampak dalam bentuk fisik, tetapi melalui cara-cara baru yang memanfaatkan dominasi ekonomi global untuk mengendalikan negara yang lemah. Beberapa bentuk neo-imperialisme yang menjadi tantangan bagi penerapan ekonomi yang berlandaskan Pancasila antara lain adalah:

a. Investasi Asing Langsung (FDI)

Meskipun investasi asing dapat mendatangkan modal untuk pembangunan, sering kali investasi asing ini mendominasi sektor-sektor strategis yang seharusnya menjadi

hak dan kontrol negara. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada negara asing, yang mengurangi kemandirian ekonomi Indonesia, serta mempengaruhi kebijakan dalam sektor-sektor penting seperti energi, pertanian, dan infrastruktur yang ada pada suatu wilayah.

b. Utang Luar Negeri

Utang luar negeri yang diambil oleh negara Indonesia dengan syarat-syarat yang merugikan, seperti bunga yang tinggi atau kewajiban untuk melakukan privatisasi sumber daya alam, dapat memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Utang yang tak terkendali dapat menyebabkan ketergantungan yang terus menerus pada negara-negara pemberi pinjaman, serta memberi pengaruh politik yang merugikan kedaulatan ekonomi Indonesia.

c. Penguasaan Pasar oleh Perusahaan Multinasional

Perusahaan-perusahaan multinasional sering kali mendominasi pasar Indonesia, baik di sektor manufaktur, perdagangan, maupun distribusi. Ketergantungan pada suatu perusahaan-perusahaan besar ini dapat melemahkan pelaku usaha lokal dan menghambat berkembangnya industri dalam negeri. Selain itu, kehadiran perusahaan multinasional juga dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, di mana sebagian besar keuntungan dari kegiatan ekonomi justru mengalir keluar negeri.

d. Ketergantungan Ekonomi Digital

Era digital dan teknologi informasi semakin mendominasi kehidupan ekonomi global. Namun, ketergantungan pada suatu teknologi asing, khususnya yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dari negara maju, dapat berisiko pada kehilangan kemandirian dalam sektor digital. Ketergantungan pada platform dan infrastruktur digital yang dikendalikan oleh pihak asing berpotensi mengancam kedaulatan data dan informasi, serta mengurangi kontrol negara terhadap kebijakan ekonomi digital.

e. Ketidakseimbangan dalam Pendidikan dan Penelitian

Salah satu faktor yang dapat memperparah neo-imperialisme adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia. Pendidikan yang tidak merata dan rendahnya kapasitas riset di dalam negeri menyebabkan Indonesia bergantung pada transfer teknologi dari negara maju. Hal ini memperburuk ketergantungan ekonomi dan teknologi Indonesia pada pihak luar, sehingga sulit untuk membangun inovasi dan kapasitas ekonomi yang mandiri.

Keberadaan tantangan-tantangan tersebut menunjukkan betapa pentingnya implementasi ekonomi berlandaskan Pancasila sebagai upaya untuk bisa menghindari dan

melawan neo-imperialisme. Pembaharuan hukum ekonomi Indonesia ini harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, yang mengutamakan keberlanjutan dan kemandirian ekonomi. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menjadi landasan penting dalam membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat serta diharapkan mampu menyejahterakan masyarakat.

Pancasila ini mengandung prinsip gotong royong, yang sejatinya menjadi inti dari pembaharuan hukum ekonomi Indonesia. Gotong royong mengajarkan kita bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga oleh upaya bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan bersama. Dalam kerangka pembaharuan hukum ekonomi ini, maka kegotongroyongan harus dijadikan nilai dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yang kemudian akan menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam melaksanakan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan menempatkan kegotongroyongan sebagai nilai inti dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia dapat mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial, yang mendukung kemandirian ekonomi dan melawan segala bentuk penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh pihak luar, baik dalam bentuk neo-imperialisme maupun dominasi ekonomi global. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mandiri, kuat, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa (Irawan dkk., 2023).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi ancaman serius dari neo-imperialisme, yang mengancam kedaulatan ekonomi melalui dominasi investasi asing, utang luar negeri yang merugikan, dan penguasaan pasar oleh perusahaan multinasional. Untuk mengatasi tantangan ini, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ekonomi sangat penting. Ekonomi Pancasila mengutamakan prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan yang bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, menghindari ketimpangan sosial, serta memprioritaskan gotong royong. Namun, implementasi ekonomi Pancasila yang masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketergantungan pada teknologi asing dan ketidakseimbangan dalam sektor pendidikan dan penelitian. Oleh karena itu, pembaruan hukum ekonomi yang berbasis pada Pancasila sangat diperlukan untuk menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan ekonomi yang adil dan mandiri, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi, sementara pengusaha harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk lokal yang dapat bersaing di pasar global. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih peduli untuk mendukung produk dalam negeri demi memperkuat perekonomian nasional. Dengan semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia dapat mewujudkan ekonomi yang lebih kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Afisi, O. T. (n.d.). Neocolonialism. Retrieved January 7, 2025, from <https://iep.utm.edu/neocolon/>
- Agusalim, L., Karim, M., & Saefuddin, A. (2014). Rekonstruksi ekonomi Pancasila sebagai perwujudan keberlanjutan pembangunan nasional. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 1(01), 39–52. <https://trilogi.ac.id/jurnal/ks/index.php/jks/article/view/138>
- Aliansi Kebangsaan, & Bakti, S. N. (2019). *Menggalang ketahanan nasional dengan paradigma Pancasila*. PT Kompas Media Nusantara.
- Anggoro, S. A., & Dwiranda, I. F. (2019). Politik hukum industrialisasi di Indonesia dalam tinjauan historis. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 167–182. <https://doi.org/10.23917/JURISPRUDENCE.V9I2.8734>
- Anonim. (2024). Indonesia “Magnet” investor asing, FDI jadi daya tarik. <https://siplawfirm.id/investor-asing/?lang=id>
- Ardiansyah, M. N., Sari, D. N., Cahyani, D., Putri, M., Hamasa, Q. S., Arya, Y., & Ghozali, I. (2024). The importance of the role of the young generation as the front guard in realizing state sovereignty based on Pancasila. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 148–160. <https://doi.org/10.3342/JKEPMAS.V1I2.133>
- BPMI Setpres. (2024). Presiden Prabowo lakukan kunjungan luar negeri perdana ke sejumlah negara. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-lakukan-kunjungan-luar-negeri-perdana-ke-sejumlah-negara/>
- Firdaus, U. U. C., & Ahadah, A. M. (2022). Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter bangsa di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya tahun 2021. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 107–116.
- Gedeona, H. T. W. (2004). Mempertanyakan nilai keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi di tengah kekuatan modal. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1536>
- Gunawan, I. (2023). Dinamika politik global dalam era multipolar: Tantangan dan peluang bagi negara berkembang. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 6(2), 2787–2798. <https://doi.org/10.31539/COSTING.V7I1.12943>

- Hamid, E. S. (n.d.). Pancasila dan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Retrieved January 7, 2025, from <https://psp.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/247/2021/09/Ekonomi-Pancasila-trilogi.pdf>
- Irawan, A. D., Adibah, L. N., & Toniek, D. I. V. (2023). Pancasila sebagai ideologi yang khas dan identitas bangsa Indonesia. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 11–21.
- Munzidah, L., Rozaq, A., & Nugroho, R. W. (2024). Revitalisasi identitas nasional: Solusi berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor di era globalisasi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(6), 81–90. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V9I6.8552>
- Prabowo, T. B., & Sihaloho, R. A. (2023). Analisis ketergantungan Indonesia pada teknologi asing dalam sektor energi dan dampaknya pada keamanan nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 72–82. <https://doi.org/10.55960/JLRI.V11I1.426>
- Salim, A. (2019). Ekonomi Pancasila dan implikasinya dalam pembelajaran ekonomi. *Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan dan Ekonomi*, 2(1), 16–30. <https://doi.org/10.33627/PK.V2I1.150>
- Santoso, A. (2018). Ekonomi nasional, ketimpangan, & neo-imperialisme. <https://fisipol.ugm.ac.id/event/map-corner-klub-mkp-ugm-ekonomi-nasional-ketimpangan-neo-imperialisme/>
- Simanjuntak, T. H., Mukhlis, I., & Pratama, A. (2021). Demokrasi ekonomi Pancasila, ekonomi berdikari dalam menghadapi arus globalisasi-revolusi industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 91–108. <http://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/1252>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Sukandi, A. (2024). Analysis of opportunities and challenges for Subang City within the framework Rebana Triangle Economic Region. *Journal of Law, Social Science and Humanities*, 2(1), 68–83. <https://myjournal.or.id/index.php/JLSSH/article/view/225>
- Utami, A., Prabowo, M., Dasar, P., Keguruan dan Ilmu Pendidikan, F., & Palangka Raya, U. (2023). Internalisasi filsafat Pancasila melalui profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. *Jurnal Paris Langkis*, 3(2), 119–128. <https://doi.org/10.37304/PARIS.V3I2.8310>
- Widyatama, P. R., Trianus, J., & Utami, S. (2024). Diffusion of innovation: Application of interactive learning media in PPKn subjects in junior high school. *Jurnal Etika Demokrasi*, 9(1), 46–57. <https://doi.org/10.26618/JED.V9I1.13104>